

SKRIPSI

***COLLABORATIVE PROCESS* DALAM MENGELOLA OBJEK WISATA
ALAM MENDATTE PARK DI KABUPATEN ENREKANG**

HAIRIL AMRAN

E011181508



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

ABSTRAK

Hairil Amran (E011181508). Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. *Collaborative Process* Dalam Mengelola Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang, xiv + 88 halaman 4 tabel 9 gambar + 6 Lampiran + 5 Daftar Pustaka, Dibimbing Oleh Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA, MSc dan Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si

Objek wisata adalah salah satu sektor pengembang ekonomi suatu negara, dan menjadi andalan bagi para pelaku ekonomi di negara berkembang. pengembangan pariwisata yang baik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pengembangan dalam sektor pariwisata dapat dioptimalkan dengan cara kolaborasi yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dengan pengelola kawasan wisata dalam hal ini BUMDes Makinawa Mendatte, serta pihak swasta dalam hal ini penyedia jasa penginapan dan rumah makan dalam mengelola objek wisata alam Mendatte Park di Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park tidak berjalan dengan baik, terdapat beberapa indikator sesuai model Ansell dan Gash yang sebagian besar tidak terlaksana menjadi penyebabnya.

Kata Kunci: *Collaborative Process*, Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park di Kabupaten Enrekang.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

ABSTRACT

Hairil Amran (E011181508). Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Collaborative Process in Managing Mendatte Park Natural Tourism Objects in Enrekang Regency, xiv + 88 pages 4 tables 9 pictures + 6 Appendices + 5 Bibliography, Supervised by Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA, MSc and Rizal Pauzi, S.Sos., M.Sc

Tourism objects are one of the developing sectors of a country's economy, and are a mainstay for economic actors in developing countries. good tourism development can have a positive impact on the surrounding community both at the national and regional levels. Development in the tourism sector can be optimized by way of good collaboration.

This study aims to find out how the collaboration process is carried out by the local government in this case the Tourism Office with the manager of the tourist area in this case BUMDes Makinawa Mendatte, as well as the private sector in this case lodging and restaurant service providers in managing the Mendatte Park natural tourism object in the village Bambapuang, Anggeraja District, Enrekang Regency. The research method used in this study is a qualitative method.

The results of this study indicate that the collaboration process in the management of Mendatte Park natural attractions is not going well, there are several indicators according to the Ansell and Gash model, most of which are not implemented as the cause.

Keywords : Collaborative Process, Management of the Mendatte Park Natural Tourism Object in Enrekang Regency.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hairil Amran
NIM : E011181508
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Collaborative Process Dalam Mengelola Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang". Adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 14 April 2023

Yang menyatakan,


Hairil Amran



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hairil Amran
NIM : E011181508
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Collaborative Process Dalam Mengelola Objek Wisata Alam
Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 April 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA, MSc
NIP 1976023 200501 1 001

Pembimbing II

Rizal Pauzi, S.Sos., M.Sc
NIP

Mengetahui

Kepala Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Alwi M.Si
NIP 19630903 198903 1 002



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hairil Amran
NIM : E011 18 1508
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Collaborative Process Dalam Mengelola Objek
Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana,
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin.

Makassar, 14 April 2023

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA, MSc

Sekretaris Sidang : Rizal Pauzi, S.Sos., M.Sc

Anggota : 1. Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, M.Si

: 2. Dr. Muhammad Yunus, MA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Collaborative Process* Dalam Mengelola Objek Wisata Alam Mendatte Park di Kabupaten Enrekang”. Skripsi ini dibuat dan ditujukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S.A.P pada Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang dihadapi oleh penulis. Terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan karya ini kedepannya.

Banyak pihak yang mendukung dan menjadi penyemangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini dengan segala rasa syukur penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis **Drs. Amran Dawasa** dan **Jumiati Angka** yang telah banyak membantu dan mendukung baik

secara moril dan materil serta motivasi dan doa yang selama ini beliau panjatkan kepada Allah SWT buat penulis. Terima kasih atas pengorbanan di setiap tetes keringat, air mata dan kasih sayangnya yang senantiasa diberikan kepada penulis dari kecil sampai sekarang sehingga penulis dapat berada pada titik ini. Terima kasih juga kepada adik saya Dian Meilani, dan kakak saya Ria Amriati. S.Ars. yang sangat saya sayangi dan kasahi yang senantiasa menjadi penghibur bagi penulis. Dengan hati yang tulus dan penuh harap penulis mendoakan mereka agar senantiasa dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan limpahan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA, MSc sebagai dosen pembimbing 1 (satu) dan Bapak Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktunya memberikan ilmu, masukan, arahan, maupun dorongan yang sangat berarti sejak awal studi hingga persiapan serta terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini juga tidak akan berhasil tanpa bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta wakil dekan, staf dan jajarannya.

3. Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si.** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada masanya.
4. Bapak **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, M.AP.** selaku sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Bapak **Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA, MSc** sebagai dosen pembimbing I dan Bapak **Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si** sebagai dosen pembimbing II dan sebagai dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan, masukan serta waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, M.A.P.** dan Bapak **Dr. Muhammad Yunus, MA.** sebagai dosen penguji dalam ujian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
8. Para **Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.
9. Terima kasih kepada Seluruh **staf Departemen Ilmu Administrasi** dan **staf di lingkup FISIP Unhas** tanpa terkecuali.
10. Terima kasih kepada **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang Bapak Ahmad Faisal,** dan **Sub. Koor Pelayanan Informasi Dinas**

Pariwisata Kabupaten Enrekang Bapak Muh. Awad Hasta.S.S. Kepala Desa Mendatte Bapak Alimin Darisa, Ketua BUMDes Makinawa Mendatte Muh. Arqam, Anggota BUMDes Makinawa Mendatte Nur. Ayyub.S.Pi Pihak penyedia rumah makan dan tempat tinggal Salam Mustamin. S.Ip. dan pengunjung objek wisata alam Mendatte Park atas bantuan, informasi dan waktu yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Terima kasih **LENERA 2018** yang menjadi keluarga baru pada kehidupan kampus. Semoga harapan dan cita-cita kalian dapat tercapai dan tetap merawat serta menjaga hubungan kekeluargaan kita hingga nanti.
12. **HUMANIS FISIP UNHAS** yang menjadi tempat belajar, berproses, dan pengalaman berorganisasi penulis dengan kekeluargaan dan kebersamaan yang tak terlupakan yang diberikan selama ini.
13. **Departemen Biro Kesekretariatan** (Kak Musdalifah, Kak Jeki, Kak Mardiah, Kak Putri, Kak Sinta, Kak Firdhlia, Kak Isma, Nope, Revalino, dan Nabila) yang telah memberi banyak pelajaran dan motivasi terkait organisasi.
14. **Departemen Komunikasi dan Informasi** (Danty, Bilolo, Firman, Anrian, Adera, Azwar, Utami, dan, Tasya,) yang menjadi *partner* selama kepengurusan.
15. **Sobat Presidium** (Sul, Hasan, Farhan, Ninda, Fadli, Dien, Uni, Ika, Irma) yang menjadi kawan untuk berproses dalam berorganisasi, yang telah berjuang bersama melewati tantangan dan dinamika organisasi. Bersama tumbuh dan berproses mendewasakan diri.

16. **Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu Komisariat Unhas** yang menjadi wadah bagi penulis dalam belajar dan mengembangkan wawasan di luar lingkup kampus.
17. **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Ekonomi Sosial Politik Unhas** yang menjadi tempat bagi penulis mengenal dan mempelajari banyak pengetahuan seputar agama islam.
18. **Ikatan Mahasiswa Administrasi Sulawesi** yang menjadi tempat untuk mendapatkan pengalaman baru dan pelajaran yang berharga dengan sejumlah mahasiswa di berbagai kampus di Sulawesi.
19. Teman-teman **KKN Gelombang 106 (Enrekang 3)** yang senantiasa membangun kerjasama dan keceriaan serta pengalaman yang tak terlupakan. Terima kasih telah bekerjasama memberikan dan menyebarkan kebaikan pada sesama.
20. Kawan **Pemuda Hijrah** (Diky, Aby, Aldy, Ammang, Azwin, Iwan, Mas Kowi, Pitra, Rammat, Rafli, Amal, Bambang, dan Diles) yang menjadi kawan untuk menikmati banyaknya ciptaan tuhan yang sangat indah dengan moment-moment yang sangat berharga dengan hiburan sederhana namun berkelas.
21. Sobat **RK** (Amar, Dien, Erwin, Azimi, Fendy, Hafiz, Hasan, Indra, Inoo, Iqra, Kappi, Aan, Abe, Andrian, Farhan, Rahmat, Reza, Ricky, Sandi, Sul, Syahrizal, Syahli, Amin, Firman, Jema) dengan berbagai cerita, tindakan, humor, serta perilaku diluar nalar tanpa dapat diprediksi dan melewati batas kenormalan.
22. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan doanya. Semoga segala yang diupayakan

demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapat balasan yang besar dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan para pembaca. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

Makassar, 28 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah	1
I.3 Tujuan Penelitian	7
I.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
II.1 Konsep Kolaborasi.....	9
II.1.1 Pengertian Kolaborasi	9
II.1.2 Karakteristik Kolaborasi dan Komponen Kolaborasi.....	10
II.1.3 Kendala dalam Kolaborasi.....	14
II.2 Konsep Pemerintah Daerah	15
II.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	15
II.2.2 Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah	19
II.3 Konsep Pariwisata	20
II.3.1 Pengertian Pariwisata.....	20

II.3.2 Daya Tarik Pariwisata	21
II.3.3 Pengelolaan Pariwisata	23
II.3.4 Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata	27
II.4 Konsep Desa.....	28
II.4.1 Pengertian Desa	28
II.4.2 Ciri-ciri desa	29
II.5 Penelitian Terdahulu	30
II.6 Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
III.2 Lokasi Penelitian	36
III.3 Fokus Penelitian	36
III.4 Sumber Data	37
III.5 Narasumber atau Informan.....	38
III.6 Teknik Pengumpulan Data	38
III.7 Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
IV.1 Lokasi Objek Wisata Alam Mendatte Park.....	41
IV.1.1 Profil Kabupaten Enrekang	41
IV.1.2 Profil Kecamatan Anggeraja	44
IV.1.3 Profil Desa Mendatte.....	46
IV.1.4 Profil Objek Wisata Alam Mendatte Park	47
IV.2 Profil BUMDes Makinawa Mendatte	52
IV.2.1 BUMDes Makinawa Mendatte	52
IV.2.2 Visi dan Misi BUMdes Makinawa Mendatte	52
IV.2.3 Struktur Organisasi BUMDes Makinawa Mendatte.....	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	54

V.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	54
V.2.1 Dialog Tatap Muka (Face to face Dialogue).....	54
V.2.2 Membangun Kepercayaan.....	58
V.2.3 Komitmen pada proses kolaborasi	61
V.2.4 Shared Understanding (Saling Memahami)	65
V.2.5 Hasil Sementara (Intermediate Outcomes)	68
BAB VI PENUTUP.....	73
VI.1 Kesimpulan	73
VI.2 Saran	74
Daftar Pustaka	77

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Komparasi Penelitian Terdahulu	30
Tabel IV.2	Kecamatan di Kabupaten Enrekang	42
Tabel IV.1	Jumlah Pengunjung Mendatte Park Tahun 2021-2022.....	51
Tabel IV.1	Daftar SDM BUMDes Makinawa Mendatte	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir	34
Gambar VI.1 Peta Kabupaten Enrekang.....	44
Gambar VI.2 Peta Desa/Kelurahan Kecamatan Anggeraja.....	45
Gambar VI.3 Peta Desa Mendatte	47
Gambar VI.4 Lokasi Foto	48
Gambar VI.5 Area Camping	49
Gambar VI.6 Lokasi Berinteraksi Dengan Hewan-Hewan	50
Gambar VI.7 Lokasi <i>Paintball</i>	50
Gambar VI.7 Struktur Organisasi BUMdes Makkinawa Mendatte.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Objek wisata adalah salah satu sektor pengembang ekonomi suatu negara, dan menjadi andalan bagi para pelaku ekonomi di negara berkembang. Salah satunya Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjadi potensi yang sangat menjanjikan serta memiliki prospek baik untuk para pelaku ekonomi, salah satu yang dapat menjadi potensi utama untuk dikembangkan menjadi objek wisata alam yang menarik adalah hutan alam. Pengelolaan hutan alam yang baik dan benar dengan senantiasa memperhatikan aspek lingkungan dapat membawa potensi yang baik pula bagi pemerintah dan masyarakat sekitar. Pengelolaan potensi hutan alam menjadi objek wisata dengan senantiasa mengoptimalkan potensi baik flora, fauna, maupun keindahan alam sekitar akan menjadi peluang besar untuk dikembangkan menjadi objek wisata.

Pengembangan pariwisata yang baik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pariwisata diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat lokal, dan secara luas dapat memberikan manfaat bagi negara, sejalan dengan kebijakan pariwisata nasional, yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata.

Pengembangan dalam sektor pariwisata dapat dioptimalkan dengan cara kolaborasi yang baik. Lebih dari itu, pembentukan kolaborasi dapat digunakan untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Lebih lanjut Nawawi (1984) menjelaskan bahwa kolaborasi

merupakan upaya sadar dalam mencapai tujuan bersama yang telah mereka tetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan. Pembagian kerja tersebut bukan sebagai bentuk pengotak-ngotakan kerja, tetapi masih harus dinilai sebagai suatu kesatuan kerja yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan bersama. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tempat wisata alam yang menarik. Salah satunya adalah Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah 1.786,01 km² hadir dengan berbagai potensi yang dimiliki. (sulselprov.go.id)

Salah satunya potensi keindahan alam pegunungan yang menjadi potensi utama untuk menarik wisatawan untuk datang berkunjung di Kabupaten Enrekang ini. Banyak objek wisata yang ada di Kabupaten Enrekang, contohnya *Resting House*, *Buttu Macca*, *Buntu Sumbang*, *Dante Pine*, dan yang terbaru yaitu wisata alam Mendatte Park. Objek wisata ini hadir untuk menarik perhatian para penikmat objek wisata alam baik masyarakat setempat maupun wisatawan yang datang dari luar daerah. Objek wisata alam selalu menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur mereka baik bersama keluarga maupun bersama teman-teman.

Objek wisata alam Mendatte Park adalah objek wisata dengan berbagai kelebihan. Terletak di Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, objek wisata ini diapit oleh gugusan pegunungan karst yakni deretan tebing bambapuang di sebelah barat, dan deretan Gunung Nona di sebelah timur. Di objek wisata alam Mendatte Park ini terdapat banyak aktivitas menarik seperti taman rekreasi *camping*, *hiking*, wisata ternak, wisata pertanian, serta keberadaan lokasi foto yang indah di sini. Mengingat media sosial saat ini sangat

erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Media sosial menjadi tempat aktivitas utama digital untuk remaja, orang tua, bahkan anak-anak untuk menyimpan segala hal dalam kehidupannya. Berbagai jenis sosial media yang ada saat ini dan banyak digunakan masyarakat diantaranya Instagram, Facebook, Twitter, Telegram dan lain sebagainya. Media sosial ini kebanyakan digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi, memberikan informasi, atau sekedar menjadi wadah untuk masyarakat dapat menunjukkan eksistensi mereka dengan membagikan photo mereka atau sekedar membuat status.

Di era saat ini dimana banyak sekali bermunculan objek wisata membuat para penggiat objek wisata harus dapat berinisiatif untuk bisa membuat objek wisata yang inovatif, tidak hanya sekedar tempat berkumpul bersama teman dan keluarga, tetapi para penggiat objek wisata ini dituntut untuk dapat menyajikan objek wisata yang dapat bersaing dengan senantiasa menampilkan kelebihan yang dimiliki objek wisata tersebut. Salah satu yang dapat menarik minat wisatawan adalah keberadaan lokasi untuk foto yang saat ini menjadi kebutuhan sosial media para pengunjung objek wisata.

Objek wisata yang baik dapat tercapai melalui proses kolaborasi yang baik pula oleh pengelola objek wisata dengan cara memberikan pelayanan yang baik, contohnya keterlibatan masyarakat sekitar objek wisata yang menyediakan tempat wisata yang dapat menarik minat wisatawan, dan peran pemerintah sebagai pengurus dan pengatur segala kepentingan masyarakat. Kerjasama merupakan hal pokok yang harus dipenuhi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari manusia. Pada dasarnya kerjasama hanya berlaku jika dilakukan antara dua orang atau lebih, dengan senantiasa menyesuaikan perilaku para aktor yang terlibat.

Salah satu hal yang dapat mendukung keberhasilan kerja tim adalah kerjasama. Dengan kerjasama yang baik dalam tim akan mempermudah segala pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020) dijelaskan bahwa kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (Lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu kerjasama dapat membuat seseorang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan kemampuan berinteraksinya pun meningkat, serta dapat melatih kita untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan baru.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hadirnya pariwisata di suatu daerah pasti akan secara tidak langsung memberikan pengaruh bagi masyarakat sekitarnya. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan objek wisata yang tepat sasaran akan membawa dampak positif pula bagi masyarakat sekitar. Selain itu dengan pengelolaan objek wisata yang baik juga dapat memberi dampak positif juga bagi daerah bahkan negara sekalipun.

Pariwisata merupakan sektor penting di dalam perekonomian Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik (2020) dijelaskan bahwa pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara dengan pendapatan 16,426 Miliar US, dengan kunjungan sebanyak 1.405.554 juta jiwa. Sedangkan untuk kunjungan objek wisata alam Mendatte Park di tahun 2021 mencapai kurang lebih 3000 pengunjung dengan pendapatan kurang lebih Rp. 14.597.000.

Pada umumnya pariwisata di Indonesia masih banyak dikelola oleh pihak swasta yang memiliki modal banyak, sedangkan masyarakat setempat objek wisata seringkali dikesampingkan, bahkan kadangkala tidak dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata tersebut. Padahal masyarakat sekitar adalah orang yang lebih memahami banyak mengenai lokasi wisata dan fenomena alam serta budaya yang ada di sekitar objek wisata tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan peran pemerintah untuk membangun kerjasama yang baik dengan cara kolaborasi pemerintah, dengan pihak swasta, serta masyarakat sekitar objek wisata tersebut demi kemajuan objek wisata kedepannya.

Dengan kondisi geografis Indonesia maka pemerintah memberlakukan sistem daerah otonom dimana daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sekitar dalam lingkup Negara Republik Indonesia. Salah satunya wilayah desa yang secara administratif kedudukannya berada di bawah pemerintahan kelurahan. Desa sendiri adalah kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil dengan nama berbeda yang dikenal sebagai kampung, pekon, tiuh, dusun, padukuhan dan udik. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan definisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah baik di tingkat pusat sampai tingkat desa diharuskan untuk bisa menyediakan pelayanan yang efisien terhadap masyarakat, dengan tidak membedakan status masyarakat tersebut.

Zaenuri (2017) mengindikasikan empat komponen dalam pelibatan masyarakat dan multipihak dalam pengelolaan pariwisata. Pertama, keterlibatan aktor non negara dalam urusan pemerintahan dikarenakan masing-masing

mempunyai keterbatasan dalam sumber daya. Kedua, intensitas hubungan antara stakeholder sebagian besar masih berkategori sedang. Ketiga, transformasi kolaborasi berlangsung dari komando yang mencirikan adanya hierarki menuju pada kolaborasi yang membentuk jejaring dan kemitraan. Keempat, tahapan pengelolaan pariwisata bencana yang dilakukan secara transformatif dan runtut mulai dari *shared vision*, partisipasi, jejaring dan kemitraan, akan tercipta pariwisata-bencana yang berkelanjutan (ibid).

Aristy (2021), menyatakan bahwa diperlukan kolaborasi yang optimal dan sinergis antara para pemangku kepentingan untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi. Lebih lanjut studi ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif yang belum optimal disebabkan oleh belum sinergisnya *stakeholder* kolaborasi (ibid).

Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Enrekang yang memiliki potensi wisata alam yang sangat menjanjikan namun masih kurang baik dalam pengelolaannya. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum menyusun skripsi ini menemukan berbagai kendala dalam proses pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park yang melibatkan pemerintah dan pengelola objek wisata alam Mendatte Park. Hal ini disebabkan karena perjanjian kerjasama yang dilakukan pemerintah dan pengelola objek wisata alam Mendatte Park belum mengatur secara detail pelibatan masyarakat dalam mengelola objek wisata secara bersama untuk menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan berjudul "*Collaborative Process* dalam Mengelola Objek Wisata Alam

Mendatte Park, di Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana proses kolaborasi pada pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park di Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang *collaborative process* dalam mengelola objek wisata alam Mendatte Park di desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dengan pengelola kawasan wisata dalam hal ini BUMDes Makinawa Mendatte, serta pihak swasta dalam hal ini penyedia jasa penginapan dan rumah makan dalam mengelola objek wisata alam Mendatte Park di Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis (Akademis)

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan studi dan menambah data serta informasi tentang *collaborative process* dalam mengelola objek wisata alam misalnya Mendatte Park di Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan untuk pengelolaan kawasan wisata yang bekerjasama antar pemerintah dan masyarakat, salah satunya adalah pengembangan objek wisata alam Mendatte Park di Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kolaborasi

II.1.1 Pengertian Kolaborasi

Menurut Jonathan (2004) kolaborasi adalah proses interaksi di antara beberapa orang yang berkesinambungan. Sedangkan menurut Merriam Webster, dalam kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi diartikan sebagai kegiatan bekerja sama khususnya dalam usaha penyatuan pemikiran.

Menurut Thomson (2006) yang dikutip oleh Pramusinto dan Purwanto (2009:115), dijelaskan bahwa kolaborasi adalah sebuah yang mirip dengan kerjasama tetapi memiliki makna yang lebih dalam yakni merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan yang didasarkan oleh hubungan saling menguntungkan (mutualisme) dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi-organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom, saling berinteraksi melalui negosiasi baik secara formal maupun informal.

Pada era sekarang ini istilah kolaborasi dan kerjasama masih sering digunakan secara bergantian, belum adanya upaya mendalam untuk menunjukkan perbedaan diantaranya membuat istilah kerjasama dan kolaborasi ini masih sulit dalam pengertiannya. Penjelasan lain menurut Sabaruddin (2015:25) mengemukakan bahwa kolaborasi adalah bagian kerjasama antar organisasi, dan antar institusi dalam pencapaian tujuan yang tidak dapat dicapai atau dikerjakan secara independen.

Pada umumnya istilah kolaborasi diartikan oleh khalayak luas sebagai kerjasama yang melibatkan para aktor baik secara kelompok maupun secara individu sebagai bentuk komitmen kerja, dinilai bekerjasama secara kelompok

jauh lebih memungkinkan dalam pencapaian tujuan yang tadinya dianggap sulit jika dilakukan secara individu.

Kolaborasi secara sederhana dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk kerjasama yang dilandasi oleh saling percaya, saling menerima, saling menghargai, saling peduli, dan saling mengutamakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Wijaya (2015) mengartikan kolaborasi sebagai aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk bisa mencapai interaksinya dengan para aktor.

II.1.2 Karakteristik Kolaborasi dan Komponen Kolaborasi

Kolaborasi juga memiliki karakteristik khusus, Menurut Budney dan Gazley (2007) di dalam Dwiyanto (2015:255-256), mengatakan bahwa karakteristik utama yang melekat pada kolaborasi, sebagai berikut :

1. Setidaknya melibatkan dua atau lebih aktor, dan paling tidak salah satunya adalah institusi pemerintah
2. Masing-masing aktor dapat melakukan tawar menawar dan negosiasi atas namanya sendiri
3. Melibatkan kerjasama jangka panjang dan membutuhkan daya tahan tinggi
4. Masing-masing aktor memiliki kontribusi terhadap kolaborasi, baik bersifat material seperti sumberdaya ataupun simbolik misalnya berbagai kewenangan
5. Semua aktor bertanggung jawab atas hasilnya.

Selain karakteristik dalam kolaborasi juga pada dasarnya memiliki komponen yang menjadi indikator keberhasilan kolaborasi itu sendiri. Komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, sejalan dengan yang dikemukakan oleh Gray (1989) yang berpendapat bahwa setiap kolaborasi pasti

melibatkan beberapa komponen dasar yaitu :

1. Saling ketergantungan
2. Penyatuan pemikiran secara konstruktif untuk mencapai solusi
3. Keputusan bersama-sama aktor (*joint ownership of decisions*)
4. Tanggung jawab bersama.

Agranoff et al. (2012) berpendapat bahwa kolaborasi adalah sebuah aktivitas- aktivitas yang sifatnya horizontal dan vertikal, yang selanjutnya aktivitas tersebut dikaji melalui komponen berikut :

1. Komunikasi, komunikasi yang intensif dianggap sangat penting dalam sebuah kolaborasi. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jika komunikasi dilakukan secara tidak langsung dapat menggunakan teknologi komunikasi yang ada, komunikasi tidak langsung ini akan lebih baik dilakukan pada kolaborasi yang mempunyai konflik antar aktor.
2. Nilai tambah, nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai publik, yaitu nilai yang didasarkan pada efisiensi, demokrasi di dalam institusi atau organisasi, dan proses kolaborasi. Salah satu permasalahan di dalam membentuk nilai publik adalah terdapat tingkatan kepentingan, urgensi, permasalahan yang konteks antar lintas-sektoral, membuat pemerintah sendiri tidak bisa menentukan bagian inti pada nilai publik itu sendiri (Muqorrobin, 2016: 41), maka dari itu dibutuhkan kolaborasi dengan aktor non pemerintah.
3. Deliberasi, deliberasi adalah keunggulan dari kolaborasi dengan membuat pembelajaran saling menguntungkan (*mutual learning*), pembangunan komunitas (*building communities*), dan pemanfaatan proses interaktif (*employing interactive*).

Ansell and Gash (2007) mengemukakan bahwa pada kolaborasi terdapat komponen-komponen yang membentuk siklus dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen tersebut diantaranya :

1. Dialog tatap-muka (*face to face dialogue*)

Komunikasi langsung (*face to face*) adalah usaha untuk mengurangi persepsi aktor yang memandang adanya sisi buruk aktor lain serta mengembangkan rasa hormat antar aktor.

2. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan adalah keharusan yang dibutuhkan dalam mengembangkan kolaborasi yang efektif. Dalam membangun kepercayaan diperlukan waktu yang lama, hal ini disebabkan karena membangun kepercayaan, sehingga perlu adanya komunikasi yang intensif (terus-menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari konflik masa lalu (*prehistory antagonism*).

3. Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Komitmen adalah hal pokok yang sangat diperlukan dalam proses kolaborasi. Komitmen tidak bisa lepas dari motivasi para aktor dalam kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :

- a. *Mutual recognition* yaitu berkaitan dengan pengakuan bersama;
- b. *Joint appreciation* yakni apresiasi bersama para aktor;
- c. Kepercayaan antar aktor;
- d. *Ownership the process* (rasa memiliki pada proses), hal ini berkaitan dengan pengaruh setiap aktor dalam pengambilan keputusan namun memiliki dilema, karena adanya kompleksitas dalam kolaborasi
- e. *Interdependensi* yakni saling ketergantungan antar aktor.

4. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai misi umum, tujuan umum, objektivitas umum, dan visi bersama. Pemahaman dalam hal ini ialah upaya menyelaraskan tujuan, sehingga mengurangi timbulnya kesalahpahaman antar aktor.

5. Dampak sementara (*intermediate outcomes*)

Dampak sementara timbul dalam proses kolaborasi, maka dari itu terdapat kata “sementara” didalamnya. Dampak sementara ini menghasilkan umpan balik. Umpan balik yang diekspektasikan dalam hal ini adalah umpan balik yang bersifat positif, yang diistilahkan “*small-wins*” (kemenangan kecil) atau Roberts dan Bradley (1991) mengatakan sebagai *temporal property*.

Selanjutnya, DeSave (2007) dikutip oleh Wijaya (2015) mengatakan bahwa untuk mengatur keberhasilan kolaborasi dalam governance, maka harus memperhatikan delapan item penting berikut :

1. Struktur jaringan (*Type network structure*)
2. Komitmen terhadap tujuan (*commitment to a common purpose*)
3. Adanya saling percaya terhadap pelaku atau peserta (*Trust among the participants*)
4. Saling percaya diantara para pelaku, ada batas-batas siapa yang boleh terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat, aturan main yang jelas yang disepakati bersama, kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan (*governance*)
5. Akses terhadap kekuasaan (*access to authority*)
6. Pembagian akuntabilitas dan tanggung jawab (*distributive accountability /responsibility*)

7. Berbagi informasi (*information sharing*)
8. Akses terhadap sumberdaya (*access to resources*)

II.2.3 Kendala dalam Kolaborasi

Tidak dapat dipungkiri untuk melakukan sebuah kolaborasi yang dimana harus melibatkan orang lain di dalamnya, pasti akan dijumpai kendala di dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut Wijaya (2015) menyebutkan beberapa faktor yang dapat menggagalkan sebuah kolaborasi diantaranya :

1. Faktor budaya dimana terkadang kolaborasi gagal karena adanya sifat ketergantungan kepada proses serta tidak berani mengambil resiko atau terobosan, serta diakibatkan karena kooptasi dan strategi memecah belah dengan cara mengakomodasi kepentingan kelompok yang mendukung kebijakan pemerintah dan mengabaikan kelompok yang anti kebijakan pemerintah.
2. Berkaitan dengan faktor institusi, kolaborasi dapat gagal karena cenderung menerapkan pola hirarkis terhadap institusi-institusi lain yang terlibat pada kolaborasi tersebut.
3. Berkaitan dengan faktor politik, kolaborasi tidak dapat berjalan karena kurangnya terobosan oleh para pemimpin untuk memenuhi tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif.

Adapun pendapat yang diutarakan oleh Gray (1989) yang mengindikasikan kendala atau halangan dalam proses kolaborasi sebagai berikut :

1. Komitmen yang bertolak belakang dengan kolaborasi
2. Kondisi kebijakan yang tidak memperhatikan alokasi sumber daya
3. Sejarah penyusunan yang berangkat perbedaan ideologi dalam kurun

waktu yang cukup lama

4. Kerumitan bersifat teknis, budaya kelembagaan dan politik/non litigasi
5. Satu pihak memiliki kekuatan untuk melakukan aksi sepihak (*unilateral action*)

II.2 Konsep Pemerintah Daerah

II.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Menurut Gie (1980), Pemerintah daerah adalah satuan organisasi pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk bisa menyelenggarakan berbagai kepentingan setempat dari sekelompok orang yang menetap di suatu wilayah yang kemudian dipimpin oleh kepala pemerintah daerah. Lebih lanjut Nurcholish (2011) menjelaskan bahwa pada awalnya suatu wilayah adalah suatu komunitas yang mandiri di suatu kelompok penduduk. Satuan kelompok tersebut kemudian diberi istilah *municipal* (kota), *county* (kabupaten), dan *commune/gemeente* (desa). Untuk lebih memahami makna dari pemerintah daerah, di bawah ini diuraikan beberapa dimensi yang menyangkut pengertian pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Dimensi Sosial

Konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok masyarakat yang terorganisasi yang mendiami/bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan batasan geografis tertentu serta memiliki ciri-ciri

tertentu pula.

2. Dimensi Ekonomi

Pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi dan potensi dari daerah tertentu. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembangunan pemerintahan daerah, potensi ekonomi daerah menjadi satu indikator penting baik untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah. Setiap penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah seharusnya memperhatikan potensi ekonomi daerah. Hal ini penting agar dalam kelanjutan pengelolaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah itu dapat berdaya guna dan berhasil guna. Demikian pula dengan pemekaran daerah (pembentukan daerah otonom baru), potensi ekonomi daerah menjadi indikator utama dalam mempertimbangkan bisa tidaknya daerah itu dimekarkan.

3. Dimensi Geografi

Pemerintahan daerah dipahami sebagai suatu unit organisasi pemerintahan yang mempunyai lingkungan geografis dengan ciri-ciri tertentu, yang meliputi keadaan fisik geografis tertentu, demografis tertentu dan potensi ekonomi tertentu. Ciri-ciri geografis ini dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan maupun pembinaan masyarakat, juga terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah maupun tugas-tugas administrasi lainnya.

4. Dimensi Hukum

Pemerintah daerah dipandang sebagai suatu unit badan hukum publik. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik pemerintah daerah di samping dipandang sebagai unit organisasi pelaksana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya. Hal ini mengandung arti dalam batas-batas tertentu pemerintah daerah disertai urusan pemerintahan tertentu untuk diatur, diurus dan dikelola. Terkait dengan hal ini, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan baik berupa peraturan daerah, peraturan dan/ atau keputusan Kepala daerah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah. Sebagai badan hukum publik pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya sekaligus pemerintah juga diberi kewenangan untuk memiliki harta kekayaan sendiri serta mewakili organisasinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

5. Dimensi Administrasi

Pemerintah daerah dipahami sebagai suatu organisasi pemerintahan sendiri (Local Self Government). Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya. Di Indonesia implementasinya diwujudkan dalam pembuatan peraturan daerah artinya peraturan ini hanya dibuat untuk mengatur urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan kegiatan administrasinya dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Dari definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia tugas pemerintahan dibagi pada setiap jenjang mulai dari daerah provinsi, yang kemudian dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Pada setiap jenjang tersebut kemudian mempunyai kepala daerah yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan daerah (*local government*) hadir untuk melaksanakan tugas desentralisasi, dokumentasi, dan tugas pembantuan. Pada pembagian tugasnya pemerintah pusat lebih banyak mengurus urusan yang sifatnya absolut, sedangkan pemerintah daerah lebih fokus mengurus urusan pemerintahan yang sifatnya konkuren.

Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dapat disimpulkan bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan" dimana desentralisasi yang dimaksud adalah :

1. Desentralisasi harus dilakukan karena merupakan tuntutan dari yuridis dan sistematis dari demokrasi pancasila dan sistem politik Indonesia.
2. Desentralisasi merupakan kebutuhan bagi orde baru agar bisa melanjutkan pembangunan secara umum dan terkhusus pada pembangunan jangka kedua kedepannya.
3. Demokrasi kita yang masih menjadi tren di dunia. Tentang demokrasi yang bagaimana yang dibutuhkan saat ini, tentu saja yang menjadi pembicaraan bukan hanya persoalan ideal tetapi juga persoalan teknis.

Dalam pembagiannya di indonesia, kepala negara dipimpin oleh presiden yang memiliki kekuasaan pemerintahan negara, yang kemudian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil presiden, dan menteri, sedangkan untuk tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur yang kemudian dalam tugasnya

dibantu oleh wakil gubernur, dan untuk wilayah kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan wilayah kota dipimpin oleh walikota.

II.2.2 Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah

Di negara kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan sistem otonomi bagi daerah membuat daerah memiliki kebebasan dalam mengelola daerahnya masing-masing. Tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa di Indonesia ada serangkaian aturan yang mengikat dalam hal pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Diantaranya pada bagian pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang diatur dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana tugas pemerintah daerah atau kepala daerah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pemimpin jalannya urusan pemerintahan yang mempunyai wewenang daerah sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditentukan secara bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Menyusun dan juga mengajukan suatu rancangan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian akan dibahas bersama.
4. Kepala daerah mempunyai tugas dengan mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
5. Kepala daerah juga mempunyai tugas dalam mewakili daerahnya di dalam

dan juga di luar pengadilan, dan bisa menunjuk suatu kuasa hukum untuk mewakilinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Selanjutnya tugas kepala daerah yang lainnya ialah pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas pemerintah daerah di atas adapun yang menjadi wewenang kepala daerah yang diatur dalam Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai berikut :

1. Melakukan pengajuan rancangan peraturan daerah
2. Melakukan tindakan tertentu dalam kondisi yang mendesak dan diperlukan oleh daerah maupun masyarakat
3. Melakukan penetapan peraturan daerah yang sudah memperoleh persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Menetapkan peraturan kepala daerah berdasarkan keputusan kepala daerah.

II.3 Konsep Pariwisata

II.3.1 Pengertian Pariwisata

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dijelaskan bahwa pariwisata adalah segala bentuk kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang telah disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut Mathieson dan Wall (1982) dalam Pitana dan Gyatri (2005), menjelaskan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke tempat destinasi di luar tempat tinggalnya dan tempat bekerjanya dan melakukan kegiatan selama di tempat destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan mereka.

Menurut Karyono (1997:15), yang mendefinisikan pariwisata sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara lain. Lebih lanjut pariwisata menurut WTO, adalah pariwisata sebagai kegiatan orang atau sekelompok orang yang bepergian dengan melakukan perjalanan dan menempati sebuah tempat di luar lingkungan biasanya mereka tinggal dengan batas waktu tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan tujuan lainnya.

II.3.2 Daya Tarik Pariwisata

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan, didalamnya dijelaskan mendalam mengenai daya tarik wisata yang merupakan segala bentuk sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Marpaung (2002:78) menyebutkan bahwa pengertian dan daya tarik wisata adalah suatu bentuk dari aktivitas dan fasilitas yang saling berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau lokasi tertentu.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keindahan alam, keunikan budaya, dan potensi kesenian yang dimiliki membuat Indonesia layak dikembangkan dari segi pariwisatanya. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menargetkan pada pendapatan devisa di sektor pariwisata tahun 2022 sebanyak 470 juta dollar AS sampai dengan 1,7 Milyar Dolar AS atau setara dengan Rp.6,7 Triliun hingga Rp.24,4 Triliun (kurs Rp.14.358 per dollar AS) (Kompas.com, 2021)

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park di Kabupaten Enrekang juga sangat berpeluang untuk lebih dikembangkan. Mendatte Park menjadi tempat liburan favorit masyarakat Enrekang untuk menikmati waktu akhir pekan, serta pengunjung di luar Kabupaten Enrekang yang sengaja datang berwisata di Mendatte Park atau wisatawan yang sekedar singgah beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Tana Toraja. Pemandangan sekitar yang memanjakan mata serta membuat pikiran menjadi tenang adalah daya tariknya, apalagi keindahannya seperti negeri dongeng. View perbukitan hijau, pepohonan dan pegunungan akan disuguhkan di sini, tampak dari sebelah timur ada Gunung Nona dan bagian barat Gunung Bambapuang. Selain itu di objek wisata alam Mendatte Park ini tersedia berbagai fasilitas wisata seperti area parkir, toilet, mushola, kafe, warung makanan serta minuman, area camping, penyewaan peralatan camping dan sebagainya. Harga tiket masuk sangat terjangkau Rp 5.000 per orang. Hal ini kemudian menjadi peluang besar bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menarik wisatawan baik skala lokal maupun mancanegara.

Menurut Muksin (2016) pada dasarnya daya tarik pariwisata didasari atas :

1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
2. Adanya ciri khas atau spesifikasi yang sifatnya langka.
3. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
4. Terdapat sarana dan prasarana yang dapat menunjang dalam melayani para wisatawan yang hadir.
5. Mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai tambah dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang telah ada sejak

dahulu hingga saat ini.

Muksin (2016) juga menjelaskan beberapa sifat utama yang harus dimiliki suatu daerah agar bisa dikategorikan mempunyai daya tarik wisata tersendiri adalah sebagai berikut :

1. Memiliki keunikan, suatu objek wisata harus memiliki keunikan mereka masing-masing yang kemudian membuatnya tampil beda dengan objek wisata yang lain. Contohnya keunikan panorama alam di Mendatte Park yang hampir mirip dengan cerita dongeng karena dikelilingi oleh perbukitan.
2. Keaslian, adat yang masih terjaga dan alam yang masih asri bebas dari polusi yang biasanya dijumpai di perkotaan.
3. Kelangkaan, sulit dijumpai di daerah lain bahkan di negara lain sekalipun.
4. Menumbuhkan semangat dan memberikan nilai bagi wisata.

II.3.3 Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan atau usaha yang dikerjakan oleh beberapa orang yang melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan definisi mengenai pengelolaan pariwisata haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan yang jauh lebih menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunitas lokal, dan nilai-nilai sosial daerah tersebut, sehingga wisatawan dapat menikmati perjalanan wisatanya serta dapat memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitar objek wisata tersebut.

Agar supaya pengelolaan pariwisata dapat berjalan dengan lancar, Cox (1985) dalam Pitana dan Diarta (2009) menjelaskan pengelolaan pariwisata haruslah memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

1. Dalam pembangunan serta pengembangan pariwisata haruslah didasari oleh kearifan lokal dan keunikan peninggalan budaya, serta keunikan lingkungannya.
2. Yang menjadi basis pengembangan pariwisata ialah preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan pada wisatawan yang berbasis kepada keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan dampak positif, tetapi sebaliknya, mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Yoeti (2008) mengemukakan pendapat bahwa berhasilnya suatu pengelolaan objek wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3 A yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*).

Kebijakan yang mengatur terkait dengan pengembangan obyek wisata alam yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. 4 Tahun 2012 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam yang mengatur bahwa kegiatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata sumber daya alam terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Akomodasi : tempat seseorang untuk tinggal sementara
2. Jasa boga dan restoran : industri jasa di bidang penyelenggaraan

makanan dan minuman yang dikelola secara komersial

3. Transportasi dan Jasa angkut : industri usaha jasa yang bergerak di bidang angkutan darat, laut, dan udara
4. Atraksi wisata : kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan yang berkunjung
5. Cinderamata (*souvenir*) : benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa oleh wisatawan
6. Biro Perjalanan : badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali.

Sedangkan jika membahas tentang *collaborative process* dalam pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park ini tentunya tidak lepas juga dibahas tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar yang harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat. Hadiyanti (2008) mengidentifikasi beberapa elemen yang terkait dalam proses kolaborasi pengelolaan yaitu :

1. Peranan Pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan kondisi lokal, dan membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah.
2. Organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal, organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat,
3. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti Badan Permusyawaratan Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, BUMDes, dan sebagainya,

4. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia,
5. Pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya,
6. Pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai proses *bottom-up*.
7. Keterlibatan masyarakat yang secara finansial lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta.

Terkait dengan pengelolaan obyek wisata berbasis masyarakat, BUMDes Makinawa Mendatte bertindak sebagai pengelola objek wisata alam Mendatte Park. Keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan wisata didukung oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kebijakan ini mengatur bahwa BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah Kabupaten Enrekang memberikan kepercayaan kepada BUMDes Makinawa Mendatte untuk mengelola objek wisata alam Mendatte Park ini dengan landasan pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa (Kamarosid, 2016:18).

II.3.4 Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata

Ada beberapa faktor yang muncul dimana faktor tersebut dapat menjadi penghalang dalam pengembangan pariwisata. Seperti yang dikemukakan Nirwandar (2014) terdapat isu strategis yang menjadi faktor penghambat pariwisata, diantaranya sebagai berikut :

1. Isu strategi yang pertama pada masa penerapan otonomi daerah dalam sektor pariwisata dimana timbul persaingan antar daerah, persaingan pariwisata yang tidak mengarah langsung pada peningkatan komplementaritas dan pengayaan alternatif berwisata. Hal ini timbul dikarenakan beberapa faktor berikut :
 - a. Kurangnya pemahaman mengenai pariwisata
 - b. Lemahnya aturan yang mengatur perihal pelaksanaan pariwisata
 - c. Tidak adanya pedoman dari pemerintah pusat maupun daerah.

Nirwandar (2014) juga mengatakan bahwa ketiga faktor diatas tersebut membawa dampak terhadap pengelolaan pariwisata sejak masa otonomi yang lebih dilihat secara parsial.

2. Isu strategis kedua terkait dengan kondisi pengembangan pariwisata Indonesia yang pada dasarnya masih berfokus pada daerah yang menjadi tujuan wisata tertentu saja, walaupun terlihat nyata di daerah lain memiliki potensi juga untuk dijadikan tempat wisata.
3. Isu strategi ketiga erat kaitannya dengan kondisi geografis suatu daerah yang berbeda dengan tempat lain baik dari segi potensi wisata alamnya, adat/budaya, mata pencaharian penduduk sekitar, ekonomi, dan lain sebagainya yang kemudian mengharuskan untuk dikelola dengan cara yang berbeda pula, baik dari segi metode, penyimpanannya, bahkan dari

segi prioritasnya.

4. Isu strategi keempat dilihat dari kondisi alam Indonesia yang kebanyakan dapat dikelola menjadi tempat wisata apabila dilihat dari sisi potensinya baik itu daya tarik keindahan alamnya, serta budaya yang dimilikinya, namun disayangkan belum bisa dijual atau bersaing dengan daerah lain.

Selain faktor penghambat yang sudah dijelaskan di atas ada pula faktor penghambat pengembangan pariwisata di Indonesia yang kemudian dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Dari segi internal objek wisata kurang dalam hal pengelolaannya dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang mampu mengolah dan mengembangkan potensi wisata, masih kurangnya lokasi untuk dikelola menjadi objek wisata, serta masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang objek wisata tersebut. Sedangkan dari segi eksternal yang menjadi penghambat dalam pengembangan pariwisata adalah kurangnya dukungan yang diberikan pemerintah dalam hal pengelolaan objek wisata, misalnya masih buruknya akses jalan menuju objek wisata tersebut dan masih banyak lainnya.

II.4 Konsep Desa

II.4.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Kesatuan masyarakat ini juga berwenang mengatur kepentingan warga setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang telah diakui pemerintah pusat. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahannya sendiri.

Menurut Bintarto (2019) Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan wilayah lain.

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang berarti tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintah provinsi atau kota, yang dikepalai oleh kepala desa atau Peratin.

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau nelayan.

II.4.2 Ciri-ciri desa

Desa dengan perkotaan memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Secara umum desa memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat dekat dengan alam. Sehingga pekerjaan-pekerjaan tertata menjadi homogen dan cenderung bergantung pada pertanian, peternakan, dan perikanan.
2. Kepadatan penduduk relatif rendah, rasio penduduk antar wilayah rendah, terbukti dengan masih adanya rumah-rumah di desa dengan pekarangan yang tidak berdekatan dengan tetangga.
3. Interaksi masyarakat desa lebih intens, selain itu, komunikasi juga bersifat personal agar saling mengenal dan saling membantu.
4. Masyarakat desa juga memiliki semangat solidaritas yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena penduduk desa memiliki tujuan ekonomi, budaya, dan kehidupan yang sama.

5. Mobilisasi masyarakat desa juga cenderung rendah. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan lapangan pekerjaan dan ikatan masyarakat membuat penduduk desa jarang bepergian atau pergi ke tempat yang jauh.

II.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis juga menjelaskan tiga penelitian terdahulu yang terkait dengan riset penulis, sebagai berikut :

Tabel II.1 Komparasi Penelitian Terdahulu.

Nama (Tahun)	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Hasil Penelitian
Deden Saputra (2020)	Tata kelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta, dan menjadikan kampung wisata Tamansari	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kerjasama yang terjadi belum seutuhnya menjalankan prinsip kolaborasi, dan proses kolaborasinya tidak berjalan secara bersinergi

		berkembang atau mandiri.	
Yudin Citriadin, Yunita Marliana, Kiki Riska Ayu Kurniawati (2020)	Pengelolaan Kolaborasi Kepariwisata Alam di Kabupaten Dompus	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan kolaboratif kepariwisataan alam di Kabupaten Dompus.	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa meningkatnya pemahaman pengelola jasa pariwisata dan memperkenalkan pariwisata alam yang ada di Kabupaten dompu secara meluas (nasional dan Internasional)
Wida Lestari, Eka Yulyana, Lina Aryani. (2022)	Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola kolaboratif	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kerjasama dalam pengelolaan Wisata Alam

		dalam pengelolaan Wisata Alam Green Canyon di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang	Green Canyon tidak berjalan maksimal karena kurangnya partisipasi dan pengetahuan para pelaku yang terlibat baik masyarakat maupun swasta, serta peran pemerintah dalam menginisiasi kerjasama dengan masyarakat dan swasta.
--	--	---	--

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan dengan penelitian ini, perbedaan tersebut antara lain :

Pertama : Saputra (2020), tentang Tata kelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta, lebih fokus untuk mengetahui tata kelola kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis

Masyarakat di Kota Yogyakarta, dan menjadikan kampung wisata Tamansari berkembang atau mandiri. Dari penelitian tersebut diketahui hasil kesimpulan bahwa kerjasama yang terjadi belum sepenuhnya menjalankan prinsip kolaborasi, dan proses kolaborasinya tidak berjalan secara bersinergi.

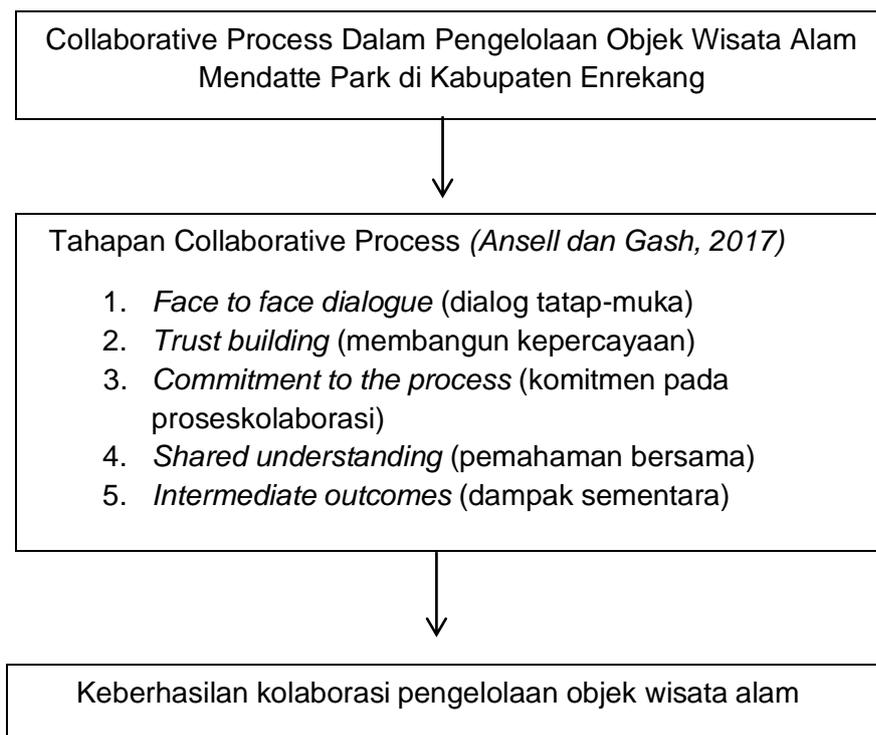
Kedua : Citriadin, et al. (2020), tentang Pengelolaan Kolaborasi Kepariwisata Alam di Kabupaten Dompu. Dalam penelitian tersebut lebih fokus untuk menjelaskan pengelolaan kolaboratif kepariwisataan alam di Kabupaten Dompu. Serta dari penelitian tersebut terdapat kesimpulan bahwa meningkatnya pemahaman pengelola jasa pariwisata dan memperkenalkan pariwisata alam yang ada di Kabupaten Dompu dan secara meluas (nasional dan internasional).

Ketiga : penelitian yang dilakukan Lestari, et al. (2022), yang fokus membahas tentang Collaborative Governance dalam pengelolaan wisata alam green canyon di Desa Medalsari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini bahwa kerjasama dalam pengelolaan Wisata Alam Green Canyon tidak berjalan maksimal karena kurangnya partisipasi dan pengetahuan para pelaku yang terlibat baik masyarakat maupun swasta, serta peran pemerintah dalam menginisiasi kerjasama.

II.6 Kerangka Pikir

Penelitian ini fokus pada analisis proses kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park di Desa Bambapuung, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui proses kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pariwisata, masyarakat diwakili oleh BUMDes Makinawa Mendatte, dan swasta diwakili oleh penyedia jasa penginapan dan rumah makan dengan tujuan untuk pengembangan objek wisata alam Mendatte Park kedepannya. Dalam

melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teori yang diajukan oleh Ansell and Gash (2007) dengan membagi beberapa komponen kolaborasi tersebut, meliputi: dialog tatap-muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dampak sementara (*intermediate outcomes*) dan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi dalam mengelola objek wisata alam Mendatte Park di Desa Bambapuang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, maka penelitian ini mengacu pada kerangka pikir penelitian, sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Pikir